

**Strategi Humas Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan)  
Kementerian PUPR dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP).  
( Deskriptif Kuantitatif Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun  
2008 di Humas Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) )**

<sup>1</sup>Yunitania Sofyanalisa, <sup>2</sup>Dadi Ahmadi

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>ysofyanalisa@gmail.com , <sup>2</sup>dadiahmadi@gmail.com*

**Abstrack.** Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) is a public agency in the executive category of ministry that managed to get the top ranking for two consecutive years in the Noddy Public and the stage 2 by 2015 and stage 1 in 2016. Based on the achievements, the subject of this research is the strategy of "Public relations" which was conducted by the Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) for the implementation of the Law on Public (KIP). This research uses the theory of public relations strategy proposed by Rosady Ruslan in the book Management of Public relations and Media Communication (2008). Where Rosady Ruslan suggests that there are five aspects of public relations strategies that can be done to achieve a common goal, namely: 1. Operational Strategy, 2. Approach persuasive and educative, social responsibility 3. Approach PR, 4. Approach cooperation, and 5. Approach coordinative and integrative. By using aspects of public relations strategies that researchers can discover what activities carried out by the PR Pusjatan in the implementation of Law No. 14/2008 on Public Information, which among others by making KIP program activities as a means or medium for the publication and imaging Pusjatan public relations, conducting workshops and seminars to persuade and educate the public about KIP, doing the development and utilization of information services for the common good, cooperation with relevant parties both internally and externally in order to facilitate the implementation of the FOI conducted by the Public relations Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

**Keywords: Strategies of Public relations, Public, Law No. 14 of 2008.**

**Abstrak.** Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu badan publik pada lembaga eksekutif kategori kementerian yang berhasil mendapat peringkat teratas selama dua tahun berturut-turut di Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik yaitu peringkat 2 pada tahun 2015 dan peringkat 1 pada tahun 2016. Berdasarkan prestasi yang diraih tersebut, maka pokok pembahasan pada penelitian ini adalah strategi humas yang telah dilakukan oleh Humas Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Penelitian ini menggunakan teori strategi humas yang dikemukakan oleh Rosady Ruslan di dalam buku Manajemen *Public relations* dan Media Komunikasi (2008). Di mana Rosady Ruslan mengemukakan bahwa ada 5 aspek strategi humas yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu: 1. Strategi Operasional, 2. Pendekatan persuasif dan edukatif, 3. Pendekatan tanggung jawab sosial humas, 4. Pendekatan kerjasama, dan 5. Pendekatan koordinatif dan integratif. Dengan menggunakan aspek-aspek strategi humas tersebut peneliti dapat menemukan kegiatan apa yang dilakukan oleh Humas Pusjatan dalam implementasi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu di antaranya dengan cara membuat kegiatan program KIP sebagai alat atau media publikasi dan pencitraan bagi humas Pusjatan, melakukan kegiatan *workshop* dan *seminar* untuk mempersuasi dan mengedukasi masyarakat mengenai KIP, melakukan pembangunan dan pemanfaatan layanan informasi untuk kepentingan bersama, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait baik internal maupun eksternal agar mempermudah dalam pelaksanaan KIP yang dilaksanakan oleh Humas Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

**Kata kunci:Strategi Humas, Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.**

## **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berusaha

mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi publik yang merupakan unsur penting dari *good governance*. Proses penyampaian informasi secara terbuka oleh suatu badan publik tentu tidak terlepas dari aktivitas komunikasi. Aktivitas komunikasi dapat ditinjau dari bagaimana informasi tersebut disampaikan dengan suatu cara tertentu hingga dapat diterima dengan baik oleh publik secara mudah, cepat dan tepat. Adanya unsur komunikasi dalam proses keterbukaan informasi membuat pihak yang memiliki wewenang untuk menjalankan aktivitas komunikasi secara strategis dalam suatu badan publik menjadi pelaksana Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut juga dijelaskan pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa unit di bidang informasi, komunikasi dan/atau kehumasan akan diberi tanggung jawab untuk melaksanakan keterbukaan informasi dalam suatu badan publik.

Penetapan posisi Hubungan Masyarakat atau yang selanjutnya disebut Humas sebagai pelaksana keterbukaan informasi perusahaan dapat ditemui di Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai badan publik lembaga eksekutif yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia, Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki kewajiban untuk menerapkan UU No. 14 Tahun 2008. Adanya keterbukaan informasi dapat menjadikan masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai badan publik yang berada di bawah naungan negara dalam menyediakan infrastruktur pembangunan di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Humas Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berhasil mengantarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih peringkat satu pada Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik adalah program evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik di Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, selaku lembaga yang berfungsi menjalankan, mengatur dan mengawasi jalannya UU No. 14 Tahun 2008 (Laporan Peningkatan KIP, 2016). Terhitung selama dua tahun terakhir, Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menempati posisi teratas sebagai Kementerian dengan tingkat Keterbukaan Informasi Publik yang terbaik di Indonesia.

Strategi humas menjadi begitu penting dalam penyampaian informasi kepada publik agar informasi dapat tersampaikan dengan baik, efektif dan tepat sasaran. Hal tersebutlah yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi humas yang digunakan oleh Humas Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sesuai yang tertera pada UU No. 14 Tahun 2008.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik meneliti dan membahasnya secara lebih rinci mengenai “Strategi Humas Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian PUPR dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP)”.

1. Untuk mengetahui Strategi Operasional, Humas Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

2. Untuk mengetahui Pendekatan Persuasif dan edukatif, Humas Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
3. Untuk mengetahui pendekatan tanggung jawab sosial, Humas Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
4. Untuk mengetahui Pendekatan kerjasama, Humas Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
5. Untuk mengetahui pendekatan koordinatif dan integratif, Humas Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

## B. Landasan Teori

Pakar humas Ahmad S. Adnanputra M.A., M.S., mengatakan bahwa “arti strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (*plan*), sedangkan rencana merupakan produk dari sebuah perencanaan (*planning*), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen” (dalam Ruslan, 2007:133).

Berdasarkan ungkapan di atas maka salah satu proses manajemen yang dilakukan oleh profesi humas adalah strategi *public relations*. Humas memiliki tujuan untuk menegakkan dan mengembangkan suatu citra yang menguntungkan bagi organisasi terhadap publiknya, dan untuk mencapai tujuan tersebut strategi humas dilakukan dan ditujukan untuk memunculkan persepsi para publik mengenai organisasi tersebut. Maka seorang humas harus bisa sedekat mungkin dengan publiknya agar dapat memberikan informasi-informasi mengenai organisasi sehingga dapat menimbulkan opini dan persepsi organisasi di masyarakat dengan demikian akan muncul citra organisasi di mata publik dan iklim yang kondusif bagi organisasi dan publiknya.

Dalam menjalankan strategi komunikasi humas maka seorang *public relations* atau humas dapat menjalankan beberapa strategi *public relations* di antaranya:

1. Strategi operasional: Strategi operasional merupakan strategi yang dilakukan melalui pelaksanaan program humas yang ditujukan untuk pendekatan masyarakat. Selain itu pihak humas harus mampu menyesuaikan program tersebut dengan nilai-nilai yang berlaku di publiknya, maka dari itu seorang humas harus mampu untuk mendengarkan apa yang publiknya harapkan.
2. Pendekatan persuasif dan edukatif: Strategi berikutnya merupakan kegiatan dengan pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif, hal ini ditujukan untuk memberikan informasi dari organisasi kepada publiknya yang bersifat mendidik maupun berupa ajakan, hal ini bertujuan agar terciptanya komunikasi dua arah yang saling pengertian, pemahaman, toleransi, dan sebagainya.
3. Pendekatan tanggung jawab sosial humas: Strategi ini adalah pendekatan dengan memunculkan sikap tanggung jawab dari seorang humas terhadap publiknya, sehingga dapat memberikan gambaran bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan pihak organisasi bukan hanya untuk kepentingan sebelah pihak saja.
4. Pendekatan kerjasama: Strategi yang berikutnya merupakan kegiatan yang melibatkan kerjasama di antara kedua belah pihak di mana dalam sebuah programnya humas turut serta melibatkan publiknya sebagai pelaku kegiatan bukan hanya menjadikan publiknya sebagai objek yang dituju. Hal ini memberikan gambaran bahwa apa yang dilakukan organisasi memiliki sifat yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Selain itu terdapat aspek saling

tolong-menolong di antara kedua pihak.

5. Pendekatan koordinatif dan integratif: Strategi yang kelima ini merupakan sebuah pendekatan terhadap masyarakat yang bertujuan untuk memperluas peranan humas di masyarakat. Dalam artian sempit humas hanya mewakili organisasi yang mewadahnya, namun dalam artian yang lebih luas yang dapat dicapai dari strategi ini adalah dengan terlibat dengan sesuatu yang lebih besar seperti berpartisipasi dengan kegiatan yang bertaraf nasional, melakukan program-program kerjasama dengan negara dan lain sebagainya (Ruslan, 2007:142).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Strategi Operasional Humas Pusjatan PUPR dalam KIP

Tabel 1. Aspek-aspek Strategi Operasional

No.	Aspek-aspek Strategi Operasional	Elemen Hasil
1.	<b>Fact Finding</b>	Biro Humas Pusjatan PUPR senantiasa melaksanakan koordinasi dengan unit kerja tertentu dalam menyediakan fakta-fakta yang terukur dalam setiap penyebaran informasi yang disajikan kepada publik. Diseminasi informasi publik dilakukan melalui sebuah prosedur yang melibatkan seluruh unit kerja yang mempunyai kewajiban dalam menyediakan informasi secara berkala kepada publik.
2.	<b>Planning and Programming</b>	Biro Humas Pusjatan PUPR menyusun rencana kerja dan capaian kerja yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik
3.	<b>Communication</b>	Biro Humas Pusjatan PUPR menjalankan strateginya dengan melakukan publikasi melalui poster dan brosur yang dipasang di ruang Pelayanan Informasi Publik kepada pengunjung yang hendak mengakses informasi. Selain itu, dalam <i>website</i> pun dijelaskan pula tata cara mengenai pengajuan informasi publik tersebut. Komunikasi ini pun dilakukan kepada pihak internal, di mana konektifitas antarunit kerja dalam penyediaan informasi publik sangatlah penting untuk menghindari kesalahan data yang hendak disajikan.
4.	<b>Evaluation</b>	Evaluasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Pusjatan PUPR. Prosedur evaluasi dilakukan melalui mekanisme analisis lembaran saran pengunjung serta evaluasi hasil kerja terhadap capaian kerja.
5.	<b>Program terkait KIP</b>	Program yang dilaksanakan oleh Biro Humas Pusjatan PUPR untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terkait dengan KIP adalah dengan membuka layanan informasi publik secara tepat dan akurat. Penyediaan informasi publik ini dilakukan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .

No.	Aspek-aspek Strategi Operasional	Elemen Hasil
		Selain itu, program terkait KIP di Pusjatan PUPR dilakukan melalui penguatan kapasitas para pelaksana KIP.
6.	<b>Sikap Humas Pusjatan PUPR Terhadap Aspirasi Masyarakat</b>	Menangkap aspirasi publik terkait dengan KIP program yang dilaksanakan adalah melalui media <i>online</i> berupa <i>facebook</i> , <i>twitter</i> dan <i>website</i> institusi. Pola interaksi yang berlangsung dalam media <i>facebook</i> dan <i>twitter</i> dapat dilaksanakan secara <i>online</i> dan <i>real time</i> .

## 2. Pendekatan Persuasif dan Edukatif Humas Pusjatan PUPR dalam KIP

Tabel 2. Aspek-aspek Pendekatan Persuasif dan Edukatif

No.	Aspek-aspek Pendekatan Persuasif dan Edukatif	Elemen Hasil
1.	<b>Menyediakan sistem informasi di situs resmi Pusjatan</b>	Informasi publik yang dimuat dalam <i>website</i> Pusjatan PUPR adalah informasi Layanan Pusat Data dan Informasi, produk Litbang Pusjatan PUPR, serta kegiatan Pusjatan PUPR.
2.	<b>Memberikan pengertian tentang kesadaran hukum dalam layanan informasi publik</b>	Pendekatan lebih banyak dilakukan tentang edukasi terkait dengan Undang-Undang KIP kepada pihak internal Pusjatan PUPR. Selain edukasi tentang peraturan, dilakukan juga pelatihan kepada penanggung jawab dari masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengumpulan data.

## 3. Pendekatan Tanggung Jawab Sosial Humas Pusjatan PUPR dalam KIP

Tabel 3. Aspek-aspek Pendekatan Tanggung Jawab Sosialisasi HUMAS

No.	Aspek-aspek Pendekatan Tanggung jawab Sosial Humas	Elemen Hasil
1.	<b>Program <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Humas Pusjatan</b>	Kegiatan tanggung jawab Sosial yang dilakukan adalah perbaikan masjid, perbaikan jalan lingkungan, serta program penghijauan di lingkungan sekitar Pusjatan PUPR dan lokasi proyek.

		Biro Humas memiliki sikap terbuka terhadap masukan-masukan dari masyarakat mengenai program CSR Pusjatan PUPR.
2.	<b>Sasaran Pendekatan Tanggung Jawab Sosial</b>	Masyarakat di sekitar kantor Pusjatan PUPR dan penduduk yang berada di lokasi proyek Pusjatan PUPR.  Penentuan sasaran dilakukan melalui forum komunikasi yang dilakukan oleh Biro Humas Pusjatan PUPR dan perwakilan masyarakat.

## 4. Pendekatan Kerjasama Humas Pusjatan PUPR dalam KIP

Tabel 4. Aspek-aspek Pendekatan Kerjasama

No.	Aspek- aspek Pendekatan Kerjasama	Elemen Hasil
1.	<b>Membina hubungan kerjasama dengan pihak internal Pusjatan PUPR</b>	Pelaksanaan kerjasama penyediaan informasi publik dengan pihak internal Pusjatan PUPR diperkuat oleh adanya SK Pimpinan.  Penguatan kerjasama ditunjang juga oleh kegiatan sosialisasi KIP kepada masing-masing unit kerja
2.	<b>Membina hubungan kerjasama dengan media untuk memperoleh opini publik yang positif bagi kedua belah pihak</b>	Hubungan kerjasama ini dilakukan melalui sebuah forum, di mana dalam forum tersebut disampaikan tentang rencana kerja Humas Pusjatan PUPR dalam penyediaan Informasi Publik.  Hubungan kerjasama dengan media dilakukan demi mencapai tujuan dari masing-masing pihak, di mana kepentingan publikasi Pusjatan PUPR, dan kebutuhan media akan berita.

## 5. Pendekatan Koordinatif dan Integratif Humas Pusjatan PUPR dalam KIP

Tabel 5. Aspek-aspek Pendekatan Koordinasi dan Integrasi

No.	Aspek-aspek Pendekatan Koordinasi dan Integrasi	Elemen Hasil
1.	<b>Berpartisipasi dalam menunjang pembangunan nasional</b>	Peran Humas Pusjatan PUPR dalam menunjang pembangunan nasional adalah dengan peran sertanya dalam menginformasikan seluruh program inovasi infrastruktur jalan dan jembatan yang dilakukan oleh Pusjatan PUPR.

2.	<b>Sasaran Pendekatan Koordinatif dan Integratif</b>	Masyarakat pada umumnya, di mana hasil inovasi, teknologi dan capaian kerja Pusjatan PUPR mampu mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
----	--	--

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Strategi Strategi operasional :  
fact finding : menemukan fakta-fakta bersangkutan tentang pemberitaan atau informasi mengenai Pusjatan.
2. planning and programming : Menyusun rencana kerja dan capaian kerja mingguan, bulanan, dan tahunan. Dan melaksanakan program humas Pusjatan terkait dengan keterbukaan informasi publik, yaitu program “kunjungan kerja” dari pihak luar hampir setiap minggunya, tergantung dari surau izin yang masuk dan ditetapkan atau disebut SK (surat keputusan) dari pimpinan.
3. communicating : Melakukan publikasi melalui poster dan brosur yang dipasang di ruang Pelayanan Informasi Publik kepada pengunjung yang hendak mengakses informasi dan *di website* dijelaskan pula tata cara mengenai pengajuan informasi publik tersebut.
4. evaluation : dilakukan rutin, mingguan, dan tahunan terhadap program yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Pusjatan PUPR.
5. Pendekatan persuasif dan edukatif : melakukan kegiatan sosialisasi KIP kepada penanggung jawab dari masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengumpulan data. sedangkan pola pembinaan atau pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Pusjatan kepada pihak eksternal/publik masih belum maksimal, karena hanya sebatas menginformasikan peraturan-peraturan mengenai KIP dan pelaksanaannya melalui media *online* dan *offline* yang diterbitkan oleh Humas Pusjatan PUPR
6. Pendekatan tanggung jawab sosial humas : Melakukan pembangunan jalan, jembatan dan memperbaiki masjid, penghijauan di lingkungan sekitar Pusjatan PUPR dan lokasi proyek, lalu dengan menerima kritik dan saran mengenai tanggung jawab sosial humas dari masyarakat mengenai program CSR Humas Pusjatan PUPR
7. Pendekatan kerjasama : melakukan pelaksanaan kerjasama penyediaan informasi publik dengan pihak internal Pusjatan PUPR (4 balai Pusjatan) membina hubungan kerjasama dengan pihak eksternal (pemerintah daerah Bandung, pemerintah pusat, komisi informasi pusat, lembaga pemerintah dan swasta maupun organisasi yang berkaitan dengan KIP, melakukan kerjasama dengan berbagai media baik cetak maupun elektronik.
8. Pendekatan koordinatif dan integratif : Melakukan kegiatan seminar dengan pemerintah untuk menginformasikan seluruh program inovasi infrastruktur jalan dan jembatan dan melakukan kegiatan pembangunan, salah satunya membangun *flyover* Antapani Bandung.

#### Daftar Pustaka

Effendy, Onong Uchjana. 2006. *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Ruslan, Rosady. 2008. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rumanti, Sr. Maria Assumpta. 2002. *Dasar-dasar Public Relations Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Yulianita, Neni. 2003. *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U).

